

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial adalah gerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sifatnya terorganisir dengan tujuan untuk mencapai sesuatu, dan seringkali diidentifikasi dengan adanya tujuan atau sarana yang diinginkan, terencana, dan tersoat suatu ideologi di dalamnya. (Cohen, 1998)

Sedangkan Zucher dan Snow merumuskan gerakan sosial sebagai sebuah kegiatan bersifat kolektif yang mengekspresikan tingkat kepedulian yang tinggi terkait beberapa isu tertentu. Sejalan dengan Spencer yang mengemukakan bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk merubah tatanan kehidupan yang baru. (Sukmana, 2016)

Gerakan sosial umumnya lahir sebagai respon terhadap keterasingan sosial, yang kerap terjadi dikarenakan tidak adanya akses individu terhadap saluran normal di lembaga negara , juga kerap disebabkan oleh ketidak puasan, frustasi, dan rasa tidak aman di lingkup kehidupan masyarakat.

Doug MA menyatakan bahwa gerakan sosial mempunyai dinamika dalam perjalanannya, yang diciptakan serta tumbuh akan mencapai sukses atau bisa gagal dan bubar atau terhenti eksistensi nya. Doug MA menyebutkan terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi Gerakan sosial, yaitu ; 1) Kesempatan atau peluang

politik. Kesempatan atau peluang politik bisa muncul apabila terdapat suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat, yang mana kebijakan tersebut bermula dari perilaku menyimpang pemerintah yang mendasari pembuatan kebijakan hanya untuk kepentingan satu golongan kelompok saja. Kebijakan pemerintah yang berak secara demikian akan memberikan sebuah peluang akan hadirnya gerakan sosial melalui kemampuan untuk memberikan peluang bagi terjadinya isu serta konsekuensi khusus tertentu yang akan ditimbulkan. 2) Pembingkaiian (*framing*). *Framing* dapat diartikan sebagai sebuah upaya strategis yang secara sadar dilakukan oleh kelompok sebagai pembentuk pemahaman secara Bersama tentang diri mereka dan dunia yang akan mendorong aksi kolektif. Snow menyebutkan bahwa proses framing membuat orang mampu memformulasikan sekumpulan konsep untuk berpikir dengan menyediakan skema interpretasi terhadap masalah-masalah di dunia. 3) Mobilisasi. Gerakan sosial dapat dikatakan memiliki *power* apabila gerakan tersebut memiliki koneksi yang banyak. Selama gerakan tersebut bisa membangun serta melakukan komunikasi dengan beberapa pihak luar. Kekuatan atau *power* dari gerakan sosial bisa saja menguat apabila terdapat kelompok elite ataupun intelektual seperti aktivis atau LSM. Kelompok elite akan mengembangkan aksi dengan beberapa organisasi luar yang luas serta akan berorientasi dengan massa (Situmorang, 2007)

Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula konsep tentang gerakan sosial menjadi lebih modern. Lahir teori baru bernama Teori Gerakan Sosial Baru, sebagai perkembangan dari Teori Gerakan Sosial Klasik. Tuntutan dari gerakan sosial baru tidak lagi berupa perbuahan ideologi dan revolusi,

namun sudah bisa berupa pandang tersendiri terkait ideologi dari tindakan yang berbasis politik, kultur, dan idologi. Mekanisme dari gerakan nya sendiri tidak lagi hanya berupa demonstrasi “membakar ban” di depan gedung, tidak lagi aksi radikal merusak fasilitas umum, namun sudah melaksanakan mekanisme gerakan yang lebih modern.

Gerakan sosial baru (*new sosial movement*) merupakan sebuah aktivitas kolektif sebagian ekstra institusional atau inti institusional serta yang bertujuan untuk membahwa perubahan atau mencegah suatu perubahan sosial. Gerakan sosisial baru (*new sosial movement*) merupakan teori gerakan sosial klasik yang dikontektualisasikan ke dalam era kekinian, yang secara esensial memiliki tujuan-tujuan yang bersifat universal, yakni diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik.

Berbeda dengan gerakan sosial lama yang cenderung terjebak dalam diskursus ideologi seperti anti-kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas, gerakan sosial baru tidak terjebak dalam hal-hal demikian. Gerakan sosial baru atau sering juga disebut sebagai gerakan sosial kontemporer tidak tertarik dengan isu revolusi, termasuk melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan sistem pemerintahan negara (Sukmana, 2016)

Kebaruan dalam gerakan sosial baru juga dapat dilihat dari penolakan secara terang-terangan mereka terhadap negara sebagai alat yang bisa digunakan untuk menciptakan kedilan sosial serta menjamin akuntabilitas demokratis. Lebih jauh bahkan gerakan sosial baru memiliki kecurigaan yang tinggi terhadap bentuk pemerintahan yang sentralistis dan hierarkis. (Faulks 1999)

Melucci mengemukakan bahwa Gerakan sosial baru adalah sebuah bentuk reaksi dari keluhan baru yang ingin melakukan perlawanan atas intervensi negara dan pasar yang terlalu besar dalam ruang privat individu dan berupaya merebut kembali otonomi sebagai individu yang telah dihancurkan oleh sebuah sistem yang manipulatif. Karenanya gerakan sosial baru tidak akan berhenti dengan hanya mendapatkan porsi pembagian keuntungan dari pendapatan usaha produksi yang lebih berimbang dengan kelompok borjuis, tetapi yang lebih penting gerakan sosial baru melawan upaya-upaya Lembaga negara yang melakukan intervensi melalui aparatur birokrasi dalam kehidupan sehari-hari. (Situmorang, 2007)

Teori gerakan sosial baru memiliki beberapa ciri, diantaranya; Satu, Memandang dan menempatkan aktivitas gerakan sosial sebagai sebuah aksi kolektif yang rasional dan memiliki nilai-nilai positif. Dua Memperbaiki dan mengkontekstualisasikan teori-teori gerakan sosial lama ke dalam era kekinian. Tiga, semakin banyak riset dan studi gerakan sosial di negara-negara di luar Amerika Utara dan Eropa Barat yang membuat kajian gerakan sosial semakin kaya. Dan yang terakhir gerakan sosial baru berhasil mengidentifikasi faktor yang memfasilitasi tumbuhnya gerakan sosial, kuat lemah nya gerakan sosial, dan berhasil atau tidak nya sebuah gerakan sosial. (Situmorang, 2007)

Doug MA menyebutkan ada beberapa faktor yang mendorong Gerakan sosial baru untuk mempengaruhi agenda politik, faktor tersebut meliputi ; Relatif terbukanya negara terhadap perubahan yang muncul dalam masyarakat sipil, stabilitas ajaran elite, adanya persekutuan elite yang bersimpati terhadap perubahan

sosial yang diusung, serta hakikat mekanisme kontrol sosial dan kemauan negara untuk menekan protes dan pembentukan gerakan baru. (Faulks 1999)

2.1.2 Hubungan Industrial

Hubungan industrial secara spesifik membahas tentang seluruh aspek dan permasalahan hubungan buruh dengan pengusaha yang menyangkut ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Termaktub dalam undang-undang No.3 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antar pelaku produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ralf Rogowski berpendapat bahwa hubungan industrial merupakan sistem sosial yang merujuk pada teori Niklas Luhmann tentang sistem sosial *autopoietic*. Teori sistem sosial *autopoietic* melihat bahwa sebuah sistem sosial terdiri dari lima jenis, yaitu hubungan industrial sebagai sistem interaksi, hubungan industrial sebagai sistem organisasi, hubungan industrial sebagai sistem konflik, hubungan industrial sebagai sistem imun/kekebalan Masyarakat, dan hubungan industrial sebagai sistem fungsi. Di mana sistem interaksi adalah sistem yang menghadirkan komunikasi antar partisipan, sistem organisasi adalah sistem komunikasi tanpa adanya pihak yang berkomunikasi, sistem konflik adalah sistem antara dua atau lebih entitas yang berfluktualisasi, sistem imun adalah sistem dengan relasi saling menguatkan satu sama lain, sedangkan sistem fungsi adalah sistem yang mencakup dan menjalankan keempat sistem sebelumnya. Rogowski berpendapat bahwa

hubungan industrial menggunakan sistem sosial *autopoietic* secara penuh dengan beroperasi pada masyarakat. Hal ini dikarenakan Rogowski melihat adanya hubungan antar personal, hubungan antar organisasi, hubungan yang saling mendukung, dan bahkan hubungan saling menghancurkan dalam hubungan industrial. (Marnisah, 2019)

Michael Salamon berpendapat bahwa pemetaan terkait organisasi hubungan industrial umumnya diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu Unitaris, Pluralis, Marxis, Tindakan Sosial, dan Pendekatan Sistem. a) Perspektif Unitaris, memandang bahwa dalam organisasi hubungan industrial haruslah terpadu dan satu, tidak boleh ada perpecahan di dalamnya. Perspektif ini melihat bahwa masyarakat industrial menginginkan upaya terpadu melalui suatu organisasi industri yang memiliki nilai-nilai umum, kepentingan, dan tujuan bersama. Dalam perspektif ini serikat buruh tidak diperkenankan untuk hadir karena dirasa akan menimbulkan perbedaan visi dan melahirkan faksi dalam hubungan industrial. b) Perspektif pluralis, memandang bahwa keanekaragaman dalam organisasi industri merupakan karakteristik umum dari sebuah organisasi industri. Kemajuan sebuah organisasi industri dilihat dari pengelolaan perbedaan-perbedaan normatif yang terjadi antar berbagai aktor-aktor industrial. Perubahan perspektif adalah keniscayaan dan karenanya tujuan utama otoritas adalah memberikan resolusi konflik yang mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada, bukan untuk memutuskan berdasarkan pada kepentingan paling banyak atas nama mayoritas guna melahirkan kolaborasi yang baik antar pihak yang berkonflik. Aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Perusahaan ini umumnya berupa

identifikasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada dalam perusahaan. Perbedaan kepentingan ini umumnya dapat berupa perbedaan peran antara manajer dan buruh, di mana manajer bertanggung jawab atas efisiensi, produktivitas, dan keuangan, sedangkan buruh lebih memprioritaskan kepentingan pribadi seperti upah yang lebih baik, kondisi lingkungan kerja yang aman, dan jaminan pekerjaan. Organisasi akan mengidentifikasi konflik dan nilai-nilai di tingkat mikro, kemudian manajemen SDM akan membuat rekonsiliasi lewat proses dan kelembagaan pada berbagai level. Hasil dari rekonsiliasi ini kemudian merupakan regulasi baru pada berbagai level formalitas, menjangkau internal dan eksternal organisasi, serta bersifat substantif maupun prosedural, yang merupakan hasil konversi bersama antar manajemen dan buruh. c) Perspektif Marxist, memandang bahwa hubungan industrial adalah sebuah hubungan antara komoditi dan pengendali. Pekerja atau buruh dianggap komoditi yang mana nilainya sama dengan komoditi berupa objek mati lain seperti mesin, teknologi, dan alat. Karenanya apabila terjadi “*trouble*” maka buruh dapat dengan mudah digantikan dengan alat lainnya. Dalam artian apabila buruh menolak bekerja sama dengan pemodal (kapitalis), pemodal akan dengan mudah memilih untuk memberhentikan buruh dan diganti dengan buruh baru yang lebih loyal daripada melakukan resolusi konflik. Dalam pandangan Marxist ini terdapat ketimpangan yang jelas antara buruh dan pengusaha, di mana pengusaha sebagai pemilik modal memegang kekuasaan mutlak dan buruh adalah salahsatu entitas dari objek kekuasaan para pemodal yang dieksploitasi dan bahkan berkemungkinan besar tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan.

d) Perspektif tindakan sosial, memandang bahwa tindakan sosial melihat hubungan industrial dari sudut pandang dan motivasi individu. Dalam hubungan industrial setiap aktor secara personal memiliki kepentingannya sendiri secara individual, barangkali bisa berupa keuntungan dari produksi bagi sebagian pengusaha, mendapatkan upah bagi para buruh bahkan membuang waktu luang atau barangkali tujuan-tujuan personal lainnya. Koheren dengan adanya beragam kepentingan di atas, setiap aktor akan mengambil Tindakan yang dirasa dapat menunjang dan relevan dengan tujuannya, yang kemudian akan terhambat oleh tindakan pihak lain yang juga sedang mengambil tindakan untuk mencapai tujuannya, apalagi apabila tujuan aktor-aktor tersebut bertentangan. Karenanya perspektif ini melihat hubungan industrial sebagai realitas yang merupakan refleksi dari kumpulan konflik kepentingan. Dalam perspektif tindakan sosial konflik kepentingan merupakan hal yang sangat wajar. Penerapan praktis teori Tindakan sosial kurang lebihnya serupa dengan perspektif pluralis dan Marxist. pihak-pihak yang berkepentingan akan duduk bersama dalam satu meja untuk membicarakan kepentingan masing-masing dan mencaari rekonsiliasi sehingga diperoleh tujuan bersama atau mekanisme yang memungkinkan tercapainya tujuan masing-masing pihak tanpa merugikan pihak lain. e) Perspektif sistem, memiliki pandangan berkebalikan dari beberapa perspektif sebelumnya membahas tentang sistem yang cenderung bersifat *bottom up*, di mana kebanyakan berarah dari individu ke sistem. Perspektif sistem melihat hubungan industrial bukan lah hubungan dari bawah ke atas, melainkan sebaliknya, dari atas ke bawah serupa dari sistem ke individu. Perspektif sistem berpandangan bahwa persoalan dalam hubungan industrial

disebabkan oleh sistem atau struktur hubungan, bukan akibat dari motif-motif atau tujuan pribadi. Hal tersebut berangkat dari pandangan mengenai unsur pembentuk hubungan industrial yang bukan hanya merupakan aktor, namun dapat dipengaruhi oleh kondisi dan lingkungan kerja, aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh negara, dan ideologi bersama yang diimplementasikan dalam produksi barang dan jasa. Konfigurasi dari elemen yang menyusun sistem hubungan industrial dapat disederhanakan menjadi sistem hubungan mikro dan sistem hubungan makro. Dimana sistem hubungan mikro normalnya terjadi dalam sebuah Perusahaan dan dibentuk oleh pembuatan aturan-aturan internal organisasi yang bersumber dari sikap, tata nilai, dan kepentingan berbagai pihak, yang mana kemudian aturan-aturan ini akan menghasilkan kontrol pada buruh yang kemudian buruh akan menghasilkan sistem kepada pasar lewat sistem produksi. Sedangkan sistem hubungan makro bersumber pada aturan atau regulasi yang dibuat oleh Lembaga pemerintahan, baik itu legislatif maupun eksekutif, yang dibuat berdasarkan sikap, tata nilai, dan kepentingan dari berbagai pihak dalam pemerintahan yang kemudian aturan atau regulasi tersebut wajib ditaati dan dipenuhi oleh sistem hubungan mikro. Karenanya sistem hubungan makro memiliki pengaruh yang lebih besar pada sistem hubungan mikro. Pengusaha maupun buruh yang berkonflik di internal Perusahaan dan tidak dapat diselesaikan dalam lingkup sistem hubungan mikro dapat membawa masalahnya ke level hubungan makro. Lebih jauh lagi masalah bisa saja tidak terdapat di sistem internal hubungan industrial, namun terdapat pada sistem hubungan yang lebih makro seperti sistem ekonomi, sosial, hukum dan politik. Karenanya perspektif sistem mendukung upaya buruh untuk menjadi aktor

politik di lembaga pemerintahan, lewat partai-partai buruh. Keberadaan perwakilan buruh pada Lembaga pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif dapat menjamin sistem ekonomi, sosial, hukum, dan politik, yang kemudian dapat membentuk hubungan industrial yang mendukung buruh.

2.2 Kerangka Pemikiran

Minimnya eksistensi dari serikat pekerja Kota Tasikmalaya akhir-akhir ini di Tengah maraknya berita tentang ketidak stabilan ekonomi juga di tengah kebijakan ketenaga kerjaan yang semakin hari semakin tidak masuk akal dan cenderung merugikan kelas pekerja menimbulkan asumsi adanya degradasi serikat buruh Kota Tasikmalaya era ini.

Di samping tidak adanya aksi yang dilakukan, minimnya program serikat pekerja, dan naiknya popularitas partai buruh yang merupakan wujud representatif dari buruh dan serikat buruh di era pemilihan umum 2024 ini menimbulkan pertanyaan kiranya apakah fungsi serikat buruh di Kota Tasikmalaya ini masih berjalan sebagaimana mestinya, serta bagaimana eksistensi dan peran serikat buruh di kota Tasikmalaya saat ini.

Penelitian ini diteiti menggunakan teori Gerakan sosial baru, di mana Gerakan sosial baru (*new sosial movement*) merupakan sebuah aktivitas kolektif sebagian ekstra institusional atau inti institusional serta yang bertujuan untuk membahwa perubahan atau mencegah suatu perubahan sosial. Gerakan sosisial baru (*new sosial movement*) merupakan teori gerakan sosial klasik yang dikontektualisasikan ke dalam era kekinian, yang secara esensial memiliki tujuan-

tujuan yang bersifat universal, yakni diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Dan teori hubungan industrial, di mana teori hubungan industrial ini membahas tentang interaksi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam hal hubungan industrial. Dengan teori ini, akan dilihat bagaimana peran dan eksistensi serikat pekerja di kota Tasikmalaya. Apakah serikat menjalankan fungsinya sebagai aktor yang merepresentasikan pekerja, atau justru serikat buruh ini adalah “kendaraan” yang ditunggangi oleh pihak yang berkepentingan dan sudah kehilangan substansi nya sebagai serikat pekerja. Untuk memudahkan dalam memahami alur yang akan dilakukan dalam penelitteian ini, pembaca dapat melihat gambar berikut:

Gambar 1.1

